

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesiapan petani kelapa sawit swadaya menuju sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Kabupaten Pesisir Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesiapan petani kelapa sawit swadaya menuju sertifikasi ISPO di Kecamatan Ranah Ampek Hulu, sebagian petani telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO, sedangkan sebagian lainnya tidak siap karena belum memenuhi beberapa indikator utama. Indikator yang relatif telah dipenuhi oleh petani berkaitan dengan kelembagaan, kegiatan budidaya, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Indikator yang masih menjadi kendala meliputi legalitas usaha, dokumen lingkungan, pencatatan kegiatan kebun, pengelolaan pestisida, pencegahan kebakaran, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Berdasarkan pemenuhan prinsip ISPO, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait legalitas, transparansi, dan pengelolaan lingkungan agar petani mampu memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO.
2. Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kesiapan petani kelapa sawit swadaya menuju sertifikasi ISPO adalah tingkat pendidikan formal dan keyakinan terhadap ISPO. Tingkat pendidikan formal berpengaruh terhadap kesiapan petani karena pendidikan membantu meningkatkan kemampuan petani dalam memahami persyaratan, prosedur, serta dokumen yang diperlukan dalam sertifikasi ISPO. Keyakinan terhadap ISPO juga berpengaruh karena semakin tinggi keyakinan petani terhadap manfaat sertifikasi, dukungan pemerintah, dan keberlanjutan usaha, maka semakin besar kecenderungan petani untuk memenuhi standar ISPO. Variabel umur, lama berusahatani, luas lahan, dan pengetahuan tentang ISPO tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan petani menuju sertifikasi ISPO.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis tingkat kesiapan petani menuju sertifikasi ISPO, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta pengurus kelompok tani perlu menyusun program pendampingan yang berfokus pada indikator dan prinsip yang masih rendah. Pendampingan tersebut mencakup fasilitasi pengurusan bukti kepemilikan lahan, STD-B, dan SPPL, penyusunan catatan penggunaan pupuk dan pestisida, penyimpanan bukti transaksi penjualan TBS, serta penerapan pengelolaan kemasan bekas pestisida. Pelatihan mengenai pemetaan area rawan kebakaran, penyediaan sarana pencegahan kebakaran, simulasi penanggulangan kebakaran, dan perlindungan keanekaragaman hayati juga perlu dilaksanakan secara berkala. Kelompok tani perlu diperkuat sebagai wadah penyampaian informasi, pencatatan kegiatan kebun, pengadaan sarana secara bersama, serta pelaksanaan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan seluruh anggota secara bertahap.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan petani, kegiatan penyuluhan dan pendampingan perlu disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan keyakinan petani terhadap manfaat sertifikasi ISPO. Petani dengan tingkat pendidikan lebih rendah perlu memperoleh pendampingan yang lebih intensif dalam memahami persyaratan sertifikasi, terutama terkait legalitas, administrasi, dan penerapan prinsip ISPO. Keyakinan petani terhadap manfaat sertifikasi perlu diperkuat melalui penyampaian informasi mengenai manfaat jangka panjang, kepastian legalitas usaha, perbaikan pengelolaan kebun, peluang peningkatan posisi tawar, serta keberlanjutan usaha. Program pendampingan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman dan keyakinan petani dapat diterapkan menjadi tindakan nyata dalam memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.